

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Alfitria, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Swadaya Gorup.
- Amirudin dan Asikin, Zainal, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta
- Asbjorn, Eide. Krause, Catarina. Allan Rosas, 1995, *Economic, Social and Culture Rights, A Textbook*. Martinus Nijhoff. Dordrecht.
- _____ 1995, *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung. Mandar Maju.
- Anwar, Yesmil, Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung; Widya Padjadjaran.
- Austin, John, 1995, *The Province of Jurisprudence Determined*, W. Rumble (ed.), Cambridge: Cambridge University Press.
- Abdulkadir, Muhammad. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Adhami, Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni.
- Bambang, Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Barda, Nawawi Arif. 2006, *Kapita Selektta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang, Badan Penerbit Undip.
- Bonanza Perwira, Taihitu, 2003, *Penataan Indonesia pada Standar-Standar HAM Internasional Dalam Kurun Waktu 1991-2002*, Jakarta; Pers Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Burke, Edmund, 1968, *Reflection on the Revolution in France*, ed. Conor Cruise O'Brien, London: Oxford University Press.

- Andi, Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- _____, 2010, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan dengan Beberapa Negara*, Jakarta, Universitas Trisakti.
- _____, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika.
- _____, 2008, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia.
- Aristo M.A, Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- A.S, Pudjoharsoyo. 2019, *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)*, Jakarta.
- Danrivanto III, 2018, *Teori Hukum dan Revolusi Industri 4.0*, Bandung, LoGoz Publishing.
- Donnelly, Jack, 2003, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, London, Cornell University Press.
- Dory, Reiling, 2018, *Teknologi Untuk Keadilan-Bagaimana Teknologi Informasi dapat Mendukung Reformasi Pengadilan*, Leiden University Press.
- Eddy O.S, Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga.
- _____, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Yogyakarta, Cahaya Atma.
- Hasan, Bisri, 2003, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Hendar, Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung, Alumni.
- Johan, Nasution, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Jimly, Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi press.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Konsep dan Sejarah Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2010, hlm. 18.

- Lilik, Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*, Bandung, PT. Citra. Aditya Bakti.
- M. Yahya, Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika.
- Maria Farida, Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Perbit Kanisius.
- Mardiono, Reksodiputro, 2020, *Sistem Peradilan Pidana*, Depok, Raja Grafindo Persada.
- Mahkamah Agung, 2010, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Jakarta, Mahkamah Agung RI.
- _____, 2019, *Buku Laporan Tahunan 2019*, Jakarta, Mahkamah Agung RI.
- Moleong, Lexy J, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya,
- Rusli, Muhammad, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Romli, Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksestensialisme dan Abolisianisme*, Bandung; Penerbit Binacipta.
- Sudikno, Mertokusumo. 2006. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- _____, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Sukandar, rumidi, 2006, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, Cet. 3; Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Soerjono, Soekanto, 1989, Purnadi Purbacara, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Supandi, 2019, *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara di Era Revolusi Industri 4.0 untuk mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*, Semarang, Undip Press.
- Sudarsono, 2019, *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Kencana.

Solahuddin, 2008, *Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*, Jakarta, Visimedia.

Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 482.

Teguh, Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2014.

Tim Penyusun Revisi, *Buku Pendoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, 2017.

UNICEF, 1998, *A Human Rights Approach to UNICEF Program for Children and Women; What It is and Some Changes It Will bring*, 1998.

Weissbrodt, David, 1994, *Hak-hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Perspektif Sejarah, dalam Peter Davies, Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Waluyadi, 2004, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung. Mandar Maju.

B. Jurnal

Asimah, Dewi, Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik, Salah satu pemenang *Lomba Karya Tulis Ilmiah dalam rangka HUT IKAHI Ke-67*.

Bawekes, Jevons, 2013, *Integrated Criminal Justice System Terhadap Sistem Peradilan Tindak Pidana Perkotaan*, *Lex Crimen* Vol. II/No. 7/November/2013.

Fakraiza, Nur, Muhammad, Harun, 2022. Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pembuktian Dalam Persidangan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Universitas Malikussaleh, Vol. V No. 2.

Putra, Dedi, 2020, *A Modern Judicial System In Indonesia: Legal Breakthrough Of E-Court And E-Legal Proceeding*, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol 9, No 2 (2020).

Putra, Adhitya Cahya Adyaksana, Astuti, Laras. 2022, Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana pada Persidangan Online Selama Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Media Of Law and Sharia*, UMY, Volume 3, Issue 3, 2022, 185-204.

Mutia Rahmi, Harun dan Amrizal, 2024. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Padapengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol. V No. 5.

Narassati, Dinda A., Pamungkas, Yonathan A., Elthania, Illona Novira Elthania., 2021, Konsep E-Litigation Sebagai Perwujudan Penegakan Hukum Berbasis E-Justice & Aktualisasinya di Indonesia, *Jurnal Legislatif Unhas* Vol 4 Nomor 2 Juni 2021.

Nugroho, Bastianto, 2017, Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP, *Jurnal Yuridika*, 32, 1, 2017, hlm. 19

Kurniawan, M. Beni, Implementation Of Electronic Trial (Elitigation) On The Civil Cases In Indonesia Courts A Legal Renewal Of Civil Procedural Law, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 9 No 1, 2020.

Lumbanraja, Anggita Doramia, 2020, Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19, *Jurnal Crepido*, Volume 02, Nomor 01, Juli 2020.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945 Perubahan Ke-Empat.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.

Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi covid-19.

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

D. Tesis

Andini, Kristina Andini, 2022, *Mekanisme Persidangan Secara Online Atau Virtual Akibat Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Palembang*. Universitas Muhammadiyah Palembang.

Khair, Azizan, 2021, *Efektifitas Persidangan Secara Daring (E-Litigation) dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Medan*, Universitas Sumatera Utara.

Putri, Tri Utami, *Efektivitas Pembuktian Perkara Pidana Dalam Pelaksanaan Sidang Virtual Di Masa Pandemi Covid-19 Yang Dilakukan Oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Barru (Studi Di Kejaksaan Negeri Barru)*. Universitas Hasanuddin.

Mohammad, Suartini, Nizla Rohaya, Insana Meliya Dwi Cipta Aprila Sari, 2020, *Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik*, Universitas Esa Unggul.

E. Sumber Hukum Lain

Adnan Buyung, Nasution, 2003, *Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum*, Bali, Makalah di Sampaikan pada Seminar Hukum Nasional VIII.

<https://kawanhukum.id/efektivitas-persidangan-virtual-di-masa-pandemi-covid19/> diakses pada tanggal 08 Oktober 2024.

<https://jdih.kejaksaan.go.id/produkHukum/3797> diakses pada tanggal 08 Oktober 2024

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/08/01000071/pengertian-hak-menurut-ahli> diakses pada tanggal 28 Desember 2024, Pukul 12.38 Wib.

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-hukum-menurut-para-ahli/#:~:text=Jan%20Gijssels%20dan%20Mark%20van%20Hoecke%20mendefinisikan%20teori%20hukum%20sebagai,besar%20dengan%20ajaran%20hukum%20umum>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2024, pukul 13.20 Wib.

<http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/22457/> diakses pada tanggal 8 Desember 2024, pukul 7.30 Wib.

<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/45683> diakses pada tanggal 9 November 2024, pukul 11.00 Wib. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13191/> diakses pada tanggal 7 Desember 2024, pukul 12.30 Wib.

<http://liputan6.com>, diakses pada 22 November 2024, Pukul 15.30 WIB

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/328038/persidangan-daring-dipersoalkan> pada tanggal 3 Januari 2025, Pukul 14.00 Wib.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-edara-ma-cl5644/> pada tanggal 31 Desember 2024, Pukul 20.00 Wib.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-pemenuhan-hak-terdakwa-melalui-sidang-pidana-elektronik-lt5fdb49ec5dbcb/> pada tanggal 30 Desember 2024, Pukul 10.00 Wib.